

Judul : Heboh dugaan pelecehan seksual, muncul desakan penetapan status darurat kekerasan
Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Heboh Dugaan Pelecehan Seksual Muncul Desakan Penetapan Status Darurat Kekerasan

Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjadi sorotan publik. Muncul desakan agar Pemerintah menetapkan status darurat kekerasan seksual.

Kasus ini mencuat pertama kali melalui akun X @saphfui yang mengunggah tangkapan layar percakapan grup yang diduga berisi pelecehan verbal dan objektifikasi terhadap perempuan. Percakapan para terduga pelaku pun tersebar luas di media sosial. Dalam percakapan tersebut, terdapat pernyataan kontroversial

seperti "diam berarti dikabulkan" dan "diam berarti consent" yang memicu reaksi keras dari warganet.

Pihak Universitas Indonesia (UI) menyatakan kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Rektor UI, Heri Hermansyah, menegaskan komitmen kampus untuk menindak tegas pelaku jika terbukti bersalah. "Kita lawan kekerasan seksual. Proses penanganan akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku," ujar Heri dalam keterangannya, Senin (13/04). Ia menambahkan, sanksi yang

diberikan dapat berupa sanksi akademik hingga pemberhentian, serta kemungkinan koordinasi dengan aparat penegak hukum, jika ditemukan unsur pidana.

Kasus ini juga mendapat perhatian serius dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan. "Ini bukan sekadar ironi, tetapi kegagalan serius dalam membangun budaya akademik yang aman dan berintegritas," kata Ubaid. Ia menilai kekerasan di lingkungan

pendidikan telah menjadi pola sistemik, bukan lagi kasus individual. Menurutnya, meningkatnya kasus serupa di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa institusi pendidikan belum mampu menjadi ruang aman bagi peserta didik. Ia pun mendesak agar Pemerintah menetapkan status darurat kekerasan seksual di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi wacana penetapan status darurat kekerasan seksual dengan hati-hati. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam

sebelum diambil oleh Pemerintah. "Harus dipikirkan dan dikaji secara matang," ujarnya.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai urgensi penanganan kekerasan seksual secara lebih serius, termasuk kemungkinan penetapan status darurat nasional guna mempercepat reformasi kebijakan dan perlindungan korban di lingkungan pendidikan.

Apakah memang perlu adanya status darurat kekerasan seksual atau tidak? Untuk mengulas isu tersebut, berikut wawancara dengan Lalu Hadrian Irfani dan Ubaid Matraji di bawah ini.

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Segera Keluarkan Status Darurat



“Pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menakutkan. Ia harus kembali menjadi tempat paling aman untuk tumbuh, belajar, dan bermartabat.”

Bagaimana pandangan dan pendapat Anda terkait tingginya angka kekerasan, baik fisik maupun kekerasan seksual di sekolah atau kampus, termasuk kasus terbaru di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI)?
Kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi kasus per kasus, tetapi sudah menjadi pola yang sistemik. Lebih berbahaya lagi, pelakunya justru banyak berasal dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sekolah dan kampus telah gagal menjadi ruang aman. Kasus di FH UI, serta di sekolah, pesantren, dan madrasah, adalah gambaran keras. Jika di ruang pendidikan saja kekerasan bisa terjadi, lalu ke mana lagi mahasiswa dan pelajar harus merasa aman. Kita sedang menghadapi situasi darurat.

Apakah Pemerintah perlu mengeluarkan status darurat kekerasan di lembaga pendidikan?
Kamari mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas, Kemendikbudisaintek, dan Kemeng, untuk segera menetapkan status darurat kekerasan di dunia pendidikan dan menjadikannya prioritas nasional.

Apa tujuannya?
Memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk implementasi kebijakan yang tegas dan berpihak pada korban. Menindak tegas pelaku tanpa kompromi, baik yang berasal dari tenaga pendidik dan kependidikan, sesama pelajar, maupun pihak di luar sekolah.

Apakah perlu ada audit?
Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem perlindungan peserta didik dan mahasiswa di semua jenjang pendidikan.

Apa masukan dan saran Anda?
Membangun budaya aman dan inklusif di seluruh lembaga pendidikan, bukan sekadar formalitas kebijakan atau peraturan di atas kertas. Pemerintah jangan hanya membuat peraturan, lalu diam. Tanpa langkah serius dan sistemik, kekerasan akan terus berulang dan merusak masa depan generasi muda. Pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menakutkan. Ia harus kembali menjadi tempat paling aman untuk tumbuh, belajar, dan bermartabat. ■REN

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Fokus Utama Lindungi Korban & Tindak Tegas



Kekerasan fisik maupun seksual di lembaga pendidikan semakin marak. Apa respons Anda atas kejadian tersebut?

Kamari memandang berbagai kasus kekerasan seksual di sekolah dan kampus, termasuk yang terbaru di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), sebagai persoalan serius yang mencederai rasa aman dan nilai-nilai pendidikan.

Anda menyayangkan adanya kasus kekerasan seksual di kampus UI? Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi peserta didik. Karena itu, setiap dugaan kasus harus ditangani secara cepat, objektif, dan berpihak pada korban, tanpa kompromi terhadap pelaku.

Apakah sistem pendidikan ada yang salah?
Terkait sistem pendidikan, yang perlu dipastikan bukan semata-mata mengosong sistem, melainkan memperkuat implementasi kebijakan yang sudah ada, khususnya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta regulasi perlindungan di satuan pendidikan.

Hal ini mencakup penguatan satuan tugas, mekanisme pelaporan yang aman, edukasi pencegahan, serta pengawasan yang konsisten agar aturan tidak hanya berhenti di atas kertas.

Ada juga desakan agar Pemerintah menetapkan status darurat

kekerasan seksual. Apakah Anda setuju dengan usulan tersebut?

Mengenal usulan penetapan status darurat kekerasan seksual, hal ini perlu dikaji secara hati-hati. Yang paling penting adalah memastikan penegakan aturan berjalan efektif dan memberikan efek jera.

Saat ini, apa fokus yang harus diprioritaskan oleh DPR dan Pemerintah?
Fokus utama tetap pada perlindungan korban dan penindakan tegas terhadap pelaku. ■REN